



RANCANGAN AKHIR

RENJA

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengaspalkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala petanjuk dan ridhanya, pengumuman Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagai pelayanan masyarakat dalam hal merumuskan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan beresahan. Sebagai arum penyelenggaraan layanan peringkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban menyiapkan Rencana Kerja Peringkat Daerah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas ini berisi tentang prioritas Program dan Indikasi Kegiatan maupun Sub Kegiatan di Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian serta indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dengan memperdamani sasaran yang telah tertuang di dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dalam setiap implementasi harus senantiasa dikendalikan, dimonitoring dan dievaluasi untuk langkah perbaikan sesuai dengan perkembangan keadaan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022. Semoga bermanfaat.

Tarutung, 19 Juli 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAAS,**



JAFFIZAL R. KEM, M.A.

Pemilihan SK.1/1/2021

NIP. 19750120 200312 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	7
HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renc. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2021 dan Capaian Rencana Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	7
2.2 Analisis Kinerja Pelaksanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	21
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III	40
TIJUAN DAN SASARAN	40
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.1.1 Telaahan Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika	40
3.1.2 Badan Pusat Statistik	42
3.1.3 Lembaga Swasta Negara/Badan Siber dan Sains Nasional	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renc) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	45
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	48
BAB IV	60
RENCANA KERJA DAN PENYAMAAN	60
BAB V	65
PENUTUP	65

BAB I

PERDAGHULUAN

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diikuti dan dimonitor pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semestinya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan rencana kinerja meliputi penyusunan sasaran (jumlah, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis, selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD (menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat Perjanjian Kinerja (PK) dengan atasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan

Anambaa, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022.

Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi, Mengimplementasikan e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pengintegrasian Data di Seluruh OPD, Mewujudkan Satu Data di Kabupaten Kepulauan Anambas, Keamanan Informasi, Menyebarluaskan Informasi Dengan Memanfaatkan TIK, serta Mengelola dan Publik melalui Monitoring Media sehingga dapat terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Penunjang Layanan Telekomunikasi dan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia.

Hal tersebut bertujuan dalam rangka mengkonstruksikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian menjadi sektor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan e-Government, pengelolaan informasi serta komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

1.3 Landasan Hukum

Peraturan serta Perundang-undangan yang digunakan sebagai latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 33);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 adalah Menentukan arah kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian di Tahun 2022 dan mewujudkan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas pembangunan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 yang sinergis dalam rangka mencapai target RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan operasional bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. Menjadi landasan penyusunan usulan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Bupati / Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan

(Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dan nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 ini mengacu kepada Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal PD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja serta rencana tindak lanjut.

BAB II

RASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas ditentukan dari hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD tahun 2021.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sudah terakomodir dirumuskan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Program dan Kegiatan Tahun 2021. Sampai dengan Bulan Juni tahun 2021 realisasi fisik di setiap Program dan Kegiatan rata-rata sudah mencapai 50% dengan realisasi keuangan 30%.

Penyerapan anggaran yang sudah memasuki akhir semester I (satu) ini masih di anggap kecil dikarenakan adanya keterlambatan transfer keuangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sehingga terjadinya kendala terhadap pencairan untuk kegiatan yang masih dan atau sudah selesai di laksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Capaian keberhasilan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada table dibawah ini :

Tabel 2.1
Capaian Persentase (%) Realisasi Fisik dan Keuangan
s.d Bulan Juni 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Page Anggaran	Persentase (%) Realisasi s.d Juni 2021	
		Keuangan	Fisik
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
PEMINATAN PERUSAHAAN UMUM PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA	6.393.187.403,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.360.500,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.116.500,00	0,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.340.000,00	0,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.340.000,00	0,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.990.000,00	0,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.990.000,00	0,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Efektivitas Kinerja SKPD	1.840.000,00	0,00	50,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.644.000,00	0,00	50,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.392.470.463,00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.140.553.462,00	37,43	50,00
Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	240.240.000,00	41,67	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.690.000,00	0,00	50,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.340.000,00		
Pengadaan Pelatihan Dinas Deservit Asilait Kelangkaan	10.120.000,00	97,50	50,00
Pembinaan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.220.000,00	0,00	50,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	771.862.000,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.226.000,00	7,82	50,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.525.200,00	81,55	50,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.727.500,00	41,52	50,00



Persediaan Bahan Logistik Kantor	77.754.000,00	16,32	50,00
Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.325.350,00	34,45	50,00
Perselenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.284.000,00	22,35	50,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.576.000,00		
Pengadaan Kendaraan Pemecangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.980.000,00	6,00	50,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.720.000,00	89,24	50,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.875.000,00	98,40	50,00
Persediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	832.341.921,00		
Persediaan Jasa Surat Menyurat	86.547.350,00	35,12	50,00
Persediaan Jasa Konsultasi, Buncher Daya Air dan Listrik	25.270.500,00	9,34	50,00
Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.424.071,00	36,67	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.277.500,00		
Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.667.500,00	22,02	50,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.610.000,00	0,00	50,00
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.701.853.500,00		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.701.853.500,00		
Pengelolaan Konten dan Pemecaraan Media Komunikasi Publik	148.391.800,00	44,25	50,00
Pelayanan Informasi Publik	330.633.000,00	29,15	50,00
Layanan Hubungan Media	4.022.828.700,00	52,96	50,00
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	7.815.486.310,00		
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.925.986.940,00		
Perselenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	5.675.986.940,00	39,05	50,00
Pemeliharaan dan Pengembangan Nama Domain dan Sub Domain dalam	250.000.000,00	12,33	50,00



Penyenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.889.499.867,00		
Pengembangan dan Pengadaan Sistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cermat	810.000.000,00	27,25	50,00
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	889.999.867,00	6,31	50,00
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	189.500.000,00	5,16	50,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	287.500.000,00		
Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	287.500.000,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	287.500.000,00	17,45	50,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERANGKAT			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERANGKAT UNTUK PENGAMANAN ISYU NASI	419.996.400,00		
Pemetaan Pola Hubungan Komunikasi Sudi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	419.996.400,00		
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sudi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	419.996.400,00	20,72	50,00
	19.615.943.843,00	30,34	50,00

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dibakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kelemahan/kekurangan tersebut sebagai umpan balik (feed back) dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Statistik s/d Tahun 2021
Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode	Gruas/Bidang Gruas Pemerintahan Daerah Dan Program/Regulasi	Indikator Kinerja Program (input/output/Regulasi)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat 1 Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kebijakan Regulasi s/d Tahun 2019 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Regulasi Tahun 2020			Target Program dan Regulasi (Kinerja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Regulasi s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.10.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Pemerintahan			12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.10.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Jasa Administrasi Keuangan			12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.10.01.01.01.10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Pemerintahan	Meningkatnya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Pemerintahan			12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.10.01.01.01.20	Penyediaan Rutinitas Pemerintahan	Meningkatnya Rutinitas Pemerintahan			12 Bulan	12 Bulan	100%			



2.10.01.01.10	Program Pelayanan Informasi Publik	Penyediaan dan Keterbukaan Informasi			100%	100%	100%		
2.10.01.01.15.17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PMED)	Penerapan Fungsi PMED			80 OPD	80 OPD	100%		
2.10.01.01.10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Daerah	Meningkatnya Akurasi Kemungkinan			30 Desa				
2.10.01.01.15.01	Pengelolaan Sistem Pendukung Operasional Sesi dan Telekomunikasi	Terlaksananya Operasional Sesi dan Telekomunikasi			5 Desa				
2.10.01.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Pengembangan Data/Informasi yang Disusun			2 Dokumen				
2.10.01.01.15.01	Pengelolaan, Updating, dan Analisa Data Statistik Daerah	Tersedianya Dokumen Identifikasi Kebutuhan dan Implementasi Rancangan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah Melalui Forum Data			1 Dokumen	1 Dokumen	100%		

2.10.01.01.16	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Mampu dan Berkualitas			80%					
2.10.01.01.16.05	Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Daerah	SDM TIK Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas yang Profesional/ Bersertifikasi			9 Orang	1 Orang	11,11%			
2.10.01.01.16.06	Seleksi Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Radio FM	Terseleksiannya Radio FM di Wilayah Kab. Kep. Anambas			15 Orang	0 orang	0%			
2.10.01.01.17	Program Optimalisasi Pemadatan Teknologi Informasi	Jumlah Penyelenggaraan G To C, G To B, G To G, Dan G To E Secara Daring			12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.10.01.01.17.17	Layanan Website Lembaga Pelayanan Publik dan Kepetatan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Media Komunikasi dan Informasi			1 Mbps					
2.10.01.01.17.18	Layanan Akses Internet Internal dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terperbaikinya Akses Internet Pemerintah Daerah			10 Mbps					
2.10.01.01.17.20	Layanan Pengembangan dan Pengujian Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi	Adanya Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas yang Terintegrasi			100%					



2.10.01.01.18	Program Kerja Sama Informasi Dengan Media Massa								
2.10.01.01.18.04	Media Center Pemerintah KKA	Tersebarnya Pelayanan Media Center Pemerintah Kab. Kep. Anambas			12 Bulan	12 Bulan	100%		
2.10.01.01.20	Program Pengembangan dan Perluasan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi di Wilayah Kab. Kep. Anambas			80%				
2.10.01.01.20.01	Penelitian Akses Telekomunikasi	Jumlah Desa yang Terjangkau Akses Telekomunikasi			8 Desa				
2.10.01.01.20.04	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Adanya Sentra dan Prasarana Network Operation Center (NOC) dan TIK di Pemerintah Kab. Kep. Anambas			100				
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.18.01.2.01	Pembinaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Delapan Perencanaan Anggaran dan Evaluasi yang disusun					4 Dokumen		



2.16.01.2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	3 Dokumen		
2.16.01.2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen		
2.16.01.2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen		
2.16.01.2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen		
2.16.01.2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen		
2.16.01.2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Sinergi SKPD	Dokumen Realisasi Fiskal dan Keuangan	-	-	-	-	-	12 Dokumen		
2.16.01.2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan yang di sedikan	-	-	-	-	-	12 Bulan		
2.16.01.2.02.0 1	Penyerahan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-	-	-	14 Bulan		
2.16.01.2.02.0 3	Pelaksanaan Pencatatan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaporan Administrasi Keuangan	-	-	-	-	-	13 Bulan		
2.16.01.2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen		



2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kebutuhan Pemangku Aparatur	-	-	-	-	-	12 Bulan		
2.16.01.2.05.0 2	Pengadaan Paksiat Dinas Berupa Atribut Kelembagaan	Jenis Paksiat Dinas	-	-	-	-	-	1 Jenis		
2.16.01.2.05.0 3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SDM Aparatur Dinas yang Profesional/ Bersertifikat	-	-	-	-	-	4 Orang		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	-	-	-	-	-	12 Bulan		
2.16.01.2.06.0 1	Penyediaan Sampakan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Sampakan Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang dibutuhkan	-	-	-	-	-	7 Jenis		
2.16.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan Kantor yang tersedia	-	-	-	-	-	7 Jenis		
2.16.01.2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	-	-	-	-	-	4 Jenis		
2.16.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	-	12 Bulan		
2.16.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	-	-	-	-	-	3 Jenis		
2.16.01.2.06.0 6	Pengeringan Rapat Koordinasi dan Konsultasi TKPD	Pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah	-	-	-	-	-	12 Bulan		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah yang diadakan	-	-	-	-	-	12 Bulan		



	Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.16.01.2.07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	-	-	-	-	-	3 Unit	
2.16.01.2.07.0 6	Pengadaan Perlakuan dan Mesin Lainnya	Perlakuan Kantor Lainnya yang Tersebut	-	-	-	-	-	5 Unit	
2.16.01.2.07.0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	12 Bulan	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pelayanan Kantor	-	-	-	-	-	12 Bulan	
2.16.01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat Dinas	-	-	-	-	-	12 Bulan	
2.16.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	-	12 Bulan	
2.16.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaanya Gaji Pegawai Tetap Tetap (PTT)	-	-	-	-	-	12 Bulan	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Teridentifikasi Kerusakan	-	-	-	-	-	12 Bulan	
2.16.01.2.09.0 1	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Memelihara lain	-	-	-	-	-	100%	
2.16.01.2.09.0 6	Pemeliharaan Perlakuan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Perlakuan Kerja yang dipelihara	-	-	-	-	-	100%	



2.16.03	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		-	-	-	-	-		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Transparansi Informasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	12 Bulan	
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Lisensi dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terselenggaranya Informasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	12 Bulan	
2.16.03.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Data Informasi	-	-	-	-	-	12 Bulan	
2.16.03.2.01.07	Layanan Hubungan Media		-	-	-	-	-	12 Bulan	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		-	-	-	-	-		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	-	-	-	-	-	12 Bulan	
2.16.03.2.01.02	Pemantauan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Akses Komunikasi Data Melalui Website dan Webmail Pemerintah Kabupaten Anambas	-	-	-	-	-	12 Bulan	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Data Pemerintah Daerah	Adanya Akses Internet di	-	-	-	-	-	76,67	



		Lingkungan Perilaku Kepulauan Anambas								
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	-	-	-	-	-	0 OPD		
2.16.03.2.02.0 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Integrasi sistem Data Pemerintah Daerah agar Dapat di Kelola Secara Terpadu	-	-	-	-	-	0 OPD		
2.16.03.2.02.0 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Adanya Pengembangan Aplikasi Utama dan Aplikasi Khoris Pemerintah yang Terintegrasi	-	-	-	-	-	0 Aplikasi		
2.16.03.2.02.0 8	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terjangkau Akses Telekomunikasi	-	-	-	-	-	3 Desa		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		-	-	-	-	-			
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	-	-	-	-	-	1 Dokumen		
2.20.02.2.01.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Angket statistik sektoral	-	-	-	-	-	1 Dokumen		



2.21.02	PROGRAM PENYELENGARAAN PERSANDIAN UNTUK PERGAMARAN INFORMASI									
2.21.02.2.02	Pemetaan Pola Rangkaian Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penggunaan Layanan yang akan Terdapat Dalam Jaring Komunikasi Sandi						3 Desa		
2.21.02.2.02.0 1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Telekomunikasi yang di amankan						3 Desa		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Pengukuran kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Analisis kinerja dimulai dengan pengukuran pencapaian keluaran dan hasil kinerja yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa keluaran dan hasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja indikator kinerja ini selanjutnya dipergunakan untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan. Setiap kegiatan dinilai tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerjanya seperti disajikan pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.3

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas**

Kode	Indikator	SPM/Struk- tur Nasional	SK K	Target Rencana Diskominfo				Kendali Capaian		Pencapaian		Catatan dan Analisa
				Tahun 2020 (Rn n-3)	Tahun 2021 (Rn n-1)	Tahun 2022 (Rn n)	Tahun 2023 (Rn n+1)	Tahun 2020 (Rn n-3)	Tahun n 2021 (Rn n-1)	Tahun 2022 (Rn n)	Tahun 2023 (Rn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.01.01.01	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran			12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	
2.10.01.01.01.07	Meningkatnya Jasa Administrasi Kecamatan			12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	
2.10.01.01.01.19	Meningkatnya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran			12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	
2.10.01.01.01.20	Meningkatnya Sarana Perkantoran			12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	
2.10.01.01.15	Penyelenggaraan dan Keterbukaan Informasi			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
2.10.01.01.15.17	Pemrosesan Fungsi PID			80 OPD	-	-	-	80 OPD	-	-	-	
2.10.01.01.15	Meningkatnya Akun Komunitas			30 Desa	-	-	-	-	-	-	-	



2.10.01.01.13.03	Terlaksananya Operasional Sindi dan Telekomunikasi			5 Deset								
2.10.01.01.13	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data/Informasi yang Diakses			2 Dokumen				1 Dokumen				
2.10.01.01.13.10	Tersedianya Dokumen Identifikasi Kebutuhan dan Implementasi Rancangan Pengumpulan Data Statistik Sekorad Daerah Melalui Forum Data			1 Dokumen				1 Dokumen				
2.10.01.01.13.6	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berkualitas			80%								
2.10.01.01.10.05	SDH TIK Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas yang Profesional/Bersertifikat			5 Orang	1 Orang							
2.10.01.01.10.06	Terselenggaranya Radio FM di Wilayah Kab. Kep. Anambas			15 Orang	0 orang							
2.10.01.01.13.7	Jumlah Penyelenggaraan G To C, G To B, G To			12 Bulan	12 Bulan							

1 Mbps			
10 Mbps			
100%			
12 Mbps	12 Mbps		
80%			
11 Mbps			



2.16.01.01.20.04	Aktifitas Service dan Pemantauan Network Operation Center (NOC) dan TIK di Pemerintah Kab. Kep. Anambas			100	-	-	-	-	-	-	-
2.16.01											
2.16.01.2.01	Dokumen Perencanaan Anggaran dan Belanja yang disusun			-	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	
2.16.01.2.01.01	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	
2.16.01.2.01.02	Dokumen RKA SKPD			-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	
2.16.01.2.01.03	Dokumen Perubahan RKA SKPD			-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	
2.16.01.2.01.04	Dokumen DPA SKPD			-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	
2.16.01.2.01.05	Dokumen Perubahan DPA SKPD			-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	
2.16.01.2.01.06	Dokumen Realisasi Pelaksanaan Kegiatan			-	12 Dokumen	-	-	-	-	-	
2.16.01.2.01.07	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	



2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan yang di sediakan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.01.2.02.01	Sistem dan Gaji dan Tunjangan PNS	-	14 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.01.2.02.02	Pelayanan Administrasi Keuangan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.01.2.02.03	Laporan Keuangan Pengaruh Daerah	-	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.01.2.03	Kebijakan Pemangaj Aparatur	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.01.2.03.02	Jenis Pelajar Dinas	-	1 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.01.2.03.09	SDM Aparatur Dinas yang Profesional/Tersertifikasi	-	4 Orang	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.01.2.04	Pelayanan Administrasi Dinas Perkantoran	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.01.2.06.01	Jenis Sampiran Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan	-	7 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.01.2.06.02	Jenis Perbaikan Kantor yang tersedia	-	7 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.01.2.06.03	Jenis Perbaikan Rumah Tangga yang tersedia	-	4 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.01.2.06.04	Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan



2.16.01.2.06.03	Borang Catatan dan Pelanggaran yang tersedia	-	3 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
2.16.01.2.06.09	Pelaksanaan Raper/Rapor Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Tidak Daerah	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
2.16.01.2.07	Borang Milik Daerah yang diadakan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
2.16.01.2.07.01	Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	-	3 Unit	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
2.16.01.2.07.06	Peralatan Kantor Lainnya yang Tersedia	-	5 Unit	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
2.16.01.2.07.09	Ketersediaan Casing Kantor	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
2.16.01.2.08	Jasa Pelayanan Kantor	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
2.16.01.2.08.01	Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat Dinas	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
2.16.01.2.08.02	Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
2.16.01.2.08.04	Ketersediaan Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
2.16.01.2.09	Borang Milik Daerah yang Teridentifikasi Kerusakan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	



2.16.01.2.04.01	Pembinaan Kemandirian Dinas/Operasional dan Mandiri lain	-	1	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.01.2.04.06	Pembinaan Perilaku Kerja yang diperbaiki	-	1	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.02								
2.16.02.2.01	Meningkatkan Transparansi Informasi Pemerintah Daerah	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.02.2.01.04	Terlaksananya Informasi Pemerintah Daerah	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.02.2.01.06	Terlaksananya Data Informasi	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.02.2.01.07		-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.03								
2.16.03.2.01	Adanya Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan
2.16.03.2.01.02	Adanya Akses Komunikasi Data Melalui Website dan Website Pemilik Kepulauan Anambas	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan



2.16.03.2.01.03	Adanya Akses Internet di Lingkungan Pemah Kabupaten Anambas	-	76,67	80,00	83,33	-	80,00	83,33	
2.16.03.2.02	Adanya Pengadaan E-Government Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	-	0 OPD	2 OPD	2 OPD	-	2 OPD	2 OPD	
2.16.03.2.02.02	Dokumen Asitektur SPAD	-	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	
2.16.03.2.02.03	Mengintegrasikan Data Perangkat Daerah agar Dapat di Kelola Secara Terpusat	-	0 OPD	2 OPD	2 OPD	-	2 OPD	2 OPD	
2.16.03.2.02.07	Adanya Pengembangan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus Pemerintah yang Terintegrasi	-	0 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	-	2 Aplikasi	2 Aplikasi	
2.16.03.2.02.09	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terjangkau Akses Telekomunikasi	-	3 Desa	1 Desa	1 Desa	-	1 Desa	1 Desa	
2.20.02									
2.20.02.2.01	Adanya Data Statistik sektoral yang Terintegrasi	-	1 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	3 Dokumen	
2.20.02.2.01.01	Tersedianya laporan statistik sektoral	-	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	3 Dokumen	



2.20.02.2.01.02	SDM Stabilitas Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas yang Profesional dan Bersertifikasi	-	-	7 Orang	8 Orang	-	-	7 Orang	8 Orang	
2.20.02.2.01.03	Aktifitas Dokumen Metadata sebagai salah satu Perekaman	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.21.02										
2.21.02.2.01	Programman Dokumen Elektronik Dalam Bentuk Analog dan Digital	-	-	3 OPD	5 OPD	-	-	3 OPD	5 OPD	
2.21.02.2.01.03	Terlaksananya Kemitraan Informasi Pemerintah Daerah	-	-	5 OPD	5 OPD	-	-	5 OPD	5 OPD	
2.21.02.2.02	Pengguna Layanan yang akan Terhubung Dalam Jaring Komunikasi Sende	-	3 Desa	2 Desa	3 Desa	-	-	2 Desa	3 Desa	
2.21.02.2.02.01	Terwujudnya Telekomunikasi yang di amankan	-	3 Desa	3 Desa	3 Desa	-	-	3 Desa	3 Desa	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kebijaksanaan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dirumuskan melalui Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas yang tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan

dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian jangka menengah. Maka dapat ditetapkan isu strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 – 2026 sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut :

1. Meningkatkan Infrastruktur Telekomunikasi di Seluruh Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dalam mendapatkan akses layanan internet secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas masih sangat jauh di rasakan oleh sebagian masyarakat. Pemenuhan terhadap kebutuhan internet yang merata ini sangat penting dalam mengembangkan Ekonomi Digital seperti yang digalakkan pemerintah, dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat ini menjadi suatu tantangan bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka melakukan pemenuhan terhadap akses internet bagi masyarakat dengan melalui koordinasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pihak Operator Seluler. Setelah penyediaan infrastruktur jaringan internet, hal yang selanjutnya perlu dilakukan adalah literasi digital kepada masyarakat. Masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang sebelumnya tidak mengenal internet harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya jaringan ini untuk peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

2. Mengimplementasikan e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel



serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI melakukan evaluasi implementasi SPBE bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tujuan dilakukan evaluasi SPBE adalah :

- a. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE;
- c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup pedoman evaluasi SPBE meliputi :

- a. Penilaian tingkat organisasi mencakup Instansi Pusat (Kementerian dan Lembaga) dan Pemerintah Daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota);
- b. Penilaian domain mencakup kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE.

Diharapkan pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui integrasi infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi, dan layanan TIK. Trend TIK di masa depan dapat diadopsi secara selektif yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung SPBE.

Diantara teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE adalah :

- a. Mobile internet merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal;
- b. Cloud computing merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna;

- c. Internet of Things (IoT) merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet;
- d. Big Data Analytics merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data;
- e. Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah.

3. Pengintegrasian Data di Seluruh OPD;

a. Data Center

Terbangunnya data center yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana pendukung yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan peralatan yang lainnya dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Manfaat data center sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan e-Government di Kabupaten Kepulauan Anambas yang semakin berkembang, serta memberikan akses data dan informasi bagi aparatur dan masyarakat dengan mudah, cepat, efektif dan efisien. Pada tahun 2021 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas rencana akan membangun Data Center, yang nantinya dapat mengintegrasikan antara data dan informasi sehingga memberikan rasa aman bagi jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. Mewujudkan Satu Data di Kabupaten Kepulauan Anambas;

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengenai tugas Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Seklaml serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat tambahan Urusan Statistik dan Persandian. Dalam kegiatan statistik sektoral fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai wali data yang memiliki tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan kewenangan daerah.

Menjadi tantangan bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas untuk pemenuhan data statistik sektoral yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel sebagai pendukung perencanaan pembangunan maupun sebagai biyaran kepada masyarakat.

Data statistik sektoral yang dipublish harus memenuhi standar Data, dan dilengkapi dengan metadata dan harus memenuhi prinsip interoperabilitas data.

3. Keamanan Informasi

Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspoon mengingat serangan siber saat ini semakin masif serta menyerang critical resource (sumber daya sangat penting). Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur :

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya;
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001;
- c. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasikan SNI

ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

6. **Menyebarkan Informasi Dengan Memanfaatkan TIK,**

a. **Tuntutan Publik pada Keterbukaan Informasi dan Transparansi**
Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.

Kegiatan pemberitaan/penyebarluasan informasi melalui media online/website beralih pada kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dengan nama kegiatan baru yaitu Pengelolaan Informasi Publik.

1. Penanganan pengaduan masyarakat dipergunakan untuk melakukan penanganan pengaduan melalui media sosial (Twitter, Facebook dan Instagram);
2. Mendisiplinasi berita-berita atau isu-isu aktual tentang program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Media Online di anambaskab.go.id;
3. Pengujian PPID dipergunakan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PPID Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas maupun Badan Publik maupun Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Penyebarluasan informasi yang positif untuk menangkal informasi atau isu hoax yang berkembang di tengah-tengah masyarakat akibat semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial

guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah.

7. Mengelola Isu Publik melalui Monitoring Media;

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi khususnya perkembangan media sosial yang demikian pesat, melahirkan apa yang disebut dengan berita bohong atau hoax. Sebuah informasi berupa gambar, suara, video, broadcast message dan lain-lain yang tidak mempunyai rujukan atau referensi apapun. Semua informasi tersebut dilahirkan berdasarkan fantasi dan khayalan si pembuat.

Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa hoax tersebar sedemikian massalnya.

Pertama, perkembangan media sosial yang begitu pesat. Media sosial dan aplikasi messenger semacam Whatsapp, Telegram dan sejenisnya kini masuk ke dalam ruang-ruang paling privat khalayak. Jika dahulu media masih dikonsumsi secara massal misalnya menonton televisi atau mendengar radio bersama-sama kini media dinikmati secara privat. Di dalam gangguan masing-masing. Dengan demikian, proses konfirmasi juga semakin lemah. Informasi yang masuk lewat grup masing-masing dibelan bulat-bulat dan mentah-mentah karena tidak ada tukar pikiran sesama khalayak setelah mengonsumsi media.

Kedua, rendahnya tingkat literasi dan konfirmasi. Rendahnya angka buta huruf tidak berbanding lurus dengan minat baca masyarakat. Budaya lisan semacam ngobrol masih lebih unggul di masyarakat kita. Aktivitas lisan semacam itu kemudian dibawa ke media sosial. Kita lupa bahwa obrolan di media sosial dan grup aplikasi pesan singkat itu bukanlah obrolan di warung kopi yang bisa menguap begitu saja. Percakapan di media sosial itu menyimpan jejak digital yang tak mudah dihapus begitu saja. Tidak hanya disimpan, percakapan itu bahkan bisa disebarluaskan ulang ke berbagai media sosial dan aplikasi pesan singkat lainnya.

Melihat tingginya angka ketidakmampuan masyarakat dalam mengkonfirmasi hoax maka meningkatkan kemampuan literasi media digital masyarakat adalah hal utama yang dapat dilakukan untuk menanggulangi

hoax. Sebab hoax tidak akan berarti apa-apa jika tidak disebarluaskan. Memutus mata rantai penyebaran hoax dengan meningkatkan literasi digital masyarakat adalah kuncinya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dirumuskan Prioritas pembangunan daerah yang pada dasarnya meliputi program-program unggulan dari Perangkat Daerah (PD) yang berkontribusi bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana dan dalam rangka untuk mencapai target Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026.

Untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik program prioritas yang tertuang dalam RKPD sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 (misi ke-4) adalah sebagai berikut :

**"Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih , Listrik, dan
Konektivitas Wilayah"**

Gambaran identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Kepulauan Anambas

Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kasell Analisis Ketersediaan					Catatan dan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tipe Output A	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tipe Output B	Substansi Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01	PROGRAM PENGUJIAN JERAKA PENGEMBANGAN RUMAH KABUPATEN/NOTA	Kab. Kep. Anambas 4		12 Bulan	5.174.012.000	PROGRAM PENGUJIAN JERAKA PENGEMBANGAN RUMAH KABUPATEN/NOTA	Kab. Kep. Anambas		12 Bulan	5.174.012.000	
2.16.01.2.01	Pengembangan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pengelola Daerah	Kab. Kep. Anambas 4	Indikator Pengembangan Anggaran dan Evaluasi yang Efektif	3 Tahun maka	12.760.000	Pengembangan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pengelola Daerah	Kab. Kep. Anambas	Indikator Pengembangan Anggaran dan Evaluasi yang Efektif	3 Tahun maka	12.760.000	
2.16.01.2.01.01	Pengembangan Indikator Pengembangan Pengelola Daerah	Kab. Kep. Anambas 4	Indikator Pengembangan Pengelola Daerah	3 Tahun maka	1.044.000	Pengembangan Indikator Pengembangan Pengelola Daerah	Kab. Kep. Anambas	Indikator Pengembangan Pengelola Daerah	3 Tahun maka	1.044.000	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Pengawasan Indikator RKA-RKPD	Kab. Kep. Anambas 4	Indikator RKA RKPD	-	-	Koordinasi dan Pengawasan Indikator RKA- RKPD	Kab. Kep. Anambas	-	-	-	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Pengawasan Indikator Perhitungan RKA-RKPD	Kab. Kep. Anambas 4	Indikator Perhitungan RKA RKPD	-	-	Koordinasi dan Pengawasan Indikator Perhitungan RKA-RKPD	Kab. Kep. Anambas	-	-	-	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Pengawasan Indikator DPA RKPD	Kab. Kep. Anambas 4	Indikator DPA RKPD	-	-	Koordinasi dan Pengawasan Indikator DPA- RKPD	Kab. Kep. Anambas	-	-	-	
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Pengawasan Indikator DPA RKPD	Kab. Kep. Anambas 4	Indikator Perhitungan DPA RKPD	-	-	Koordinasi dan Pengawasan Indikator DPA- RKPD	Kab. Kep. Anambas	-	-	-	



2.16.01.2.01.08	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Pembiayaan Kinerja BMD	Kab. Kap. Anambas 1	Dokumen Rencana Pelaksanaan Kerja dan Anggaran			Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Pembiayaan Kinerja BMD	Kab. Kap. Anambas				
2.16.01.2.01.09	Analisis Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kap. Anambas 1	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Indikator	9.110.000	Analisis Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kap. Anambas	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Indikator	9.110.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kap. Anambas 1	Administrasi Keuangan yang di antisipasi	12 Bulan	4.828.325.492	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kap. Anambas	Administrasi Keuangan yang di antisipasi	12 Bulan	4.828.325.492	
2.16.01.2.02.01	Penyusunan Dap dan Tambahan APB	Kab. Kap. Anambas 1	Survei/evaluasi Dap dan Tambahan PDB	12 Bulan	4.824.415.492	Penyusunan Dap dan Tambahan APB	Kab. Kap. Anambas	Survei/evaluasi Dap dan Tambahan PDB	12 Bulan	4.824.415.492	
2.16.01.2.02.02	Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan BMD	Kab. Kap. Anambas 1	Pelaksanaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	295.230.000	Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan BMD	Kab. Kap. Anambas	Pelaksanaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	295.230.000	
2.16.01.2.02.03	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BMD	Kab. Kap. Anambas 1	Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.000.000	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BMD	Kab. Kap. Anambas	Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.000.000	
2.16.01.2.03	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Kab. Kap. Anambas 1	Kebijakan Pengawasan Aparatur	12 Bulan	332.415.000	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Kab. Kap. Anambas	Kebijakan Pengawasan Aparatur	12 Bulan	332.415.000	
2.16.01.2.03.02	Pengaturan Pelaian Dana BMD dan Akut Kelengkapan	Kab. Kap. Anambas 1	Jenis Peluan Dana	12 Bulan	65.400.000	Pengaturan Peluan Dana BMD dan Akut Kelengkapan	Kab. Kap. Anambas	Jenis Peluan Dana	12 Bulan	65.400.000	
2.16.01.2.03.03	Kordinasi dan Pelatikan Regional Berkoordinasi Tiga dan Empat	Kab. Kap. Anambas 1	Unit Aparatur Dana yang Profesional/Barang Baru	12 Bulan	327.015.000	Kordinasi dan Pelatikan Regional Berkoordinasi Tiga dan Empat	Kab. Kap. Anambas	Unit Aparatur Dana yang Profesional/Barang Baru	12 Bulan	327.015.000	
2.16.01.2.04	Administrasi Dana Perangkat Daerah	Kab. Kap. Anambas 1	Pelaksanaan Administrasi Dana Perencanaan	12 Bulan	915.911.000	Administrasi Dana Perangkat Daerah	Kab. Kap. Anambas	Pelaksanaan Administrasi Dana Perencanaan	12 Bulan	915.911.000	
2.16.01.2.04.01	Penyusunan Survei/evaluasi Kinerja/Perencanaan Anggaran Sektor	Kab. Kap. Anambas 1	Jenis Komponen Survei/evaluasi Kinerja/Perencanaan Sektor yang di antisipasi	12 Bulan	15.205.000	Penyusunan Survei/evaluasi Kinerja/Perencanaan Anggaran Sektor	Kab. Kap. Anambas	Jenis Komponen Survei/evaluasi Kinerja/Perencanaan Sektor yang di antisipasi	12 Bulan	15.205.000	



2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pengkayaan Kantor	Kab. Korp. Asuransi 1	Jenis Peralatan Kantor yang tersedia	12 Bulan	283.310.000	Penyediaan Peralatan dan Pengkayaan Kantor	Kab. Korp. Asuransi	Jenis Peralatan Kantor yang tersedia	12 Bulan	283.310.000	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Korp. Asuransi 1	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 Bulan	21.871.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Korp. Asuransi	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 Bulan	21.871.000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Korp. Asuransi 1	Konsumsi Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	91.879.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Korp. Asuransi	Konsumsi Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	91.879.000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengkayaan	Kab. Korp. Asuransi 1	Barang Cetak dan Pengkayaan yang tersedia	12 Bulan	104.025.380	Penyediaan Barang Cetak dan Pengkayaan	Kab. Korp. Asuransi	Barang Cetak dan Pengkayaan yang tersedia	12 Bulan	104.025.380	
2.16.01.2.06.06	Pengembangan Ruang Komputer dan Fasilitas (RUPC)	Kab. Korp. Asuransi 1	Pelaksanaan Ruang Komputer dan Fasilitas ke Luar/Dalam Daerah	12 Bulan	496.522.000	Pengembangan Ruang Komputer dan Fasilitas (RUPC)	Kab. Korp. Asuransi	Pelaksanaan Ruang Komputer dan Fasilitas ke Luar/Dalam Daerah	12 Bulan	496.522.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang MIB Daerah Penunjang Utama Pemerintahan Daerah	Kab. Korp. Asuransi 1	Barang MIB Daerah yang tersedia	12 Bulan	222.545.000	Pengadaan Barang MIB Daerah Penunjang Utama Pemerintahan Daerah	Kab. Korp. Asuransi	Barang MIB Daerah yang tersedia	12 Bulan	222.545.000	
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perantara Dinas atau Fasilitas Dinas Asahan	Kab. Korp. Asuransi 1	Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	12 Bulan	129.480.000	Pengadaan Kendaraan Perantara Dinas atau Fasilitas Dinas Asahan	Kab. Korp. Asuransi	Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	12 Bulan	129.480.000	
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Meubel Lainya	Kab. Korp. Asuransi 1	Peralatan Kantor Lainya yang Tersedia	12 Bulan	80.080.000	Pengadaan Peralatan dan Meubel Lainya	Kab. Korp. Asuransi	Peralatan Kantor Lainya yang Tersedia	12 Bulan	80.080.000	
2.16.01.2.07.03	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Kab. Korp. Asuransi 1	Ketersediaan Gedung Kantor	12 Bulan	92.979.000	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Kab. Korp. Asuransi	Ketersediaan Gedung Kantor	12 Bulan	92.979.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Utama Pemerintahan Daerah	Kab. Korp. Asuransi 1	Jasa Pelayanan Kantor	12 Bulan	801.188.000	Penyediaan Jasa Penunjang Utama Pemerintahan Daerah	Kab. Korp. Asuransi	Jasa Pelayanan Kantor	12 Bulan	801.188.000	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Ruang Hospital	Kab. Korp. Asuransi 1	Pelaksanaan Jasa Ruang Hospital Daerah	12 Bulan	178.735.880	Penyediaan Jasa Ruang Hospital	Kab. Korp. Asuransi	Pelaksanaan Jasa Ruang Hospital Daerah	12 Bulan	178.735.880	



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2.16.01.1.06.02	Pengelolaan Jasa Komunikasi, Raster Data, dan lain-lain	Kab. Kepulauan Anambas	Komersial Jasa Komunikasi Raster Data dan lain-lain	12 Bulan	25.275.000	Pengelolaan Jasa Komunikasi, Raster Data, dan lain-lain	Kab. Kepulauan Anambas	Komersial Jasa Komunikasi Raster Data dan lain-lain	12 Bulan	25.275.000	
2.16.01.1.06.04	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Anambas	Komersial Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	507.185.700	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Anambas	Komersial Jasa Pelayanan Umum Kantor (PTT)	12 Bulan	507.185.700	
2.16.01.1.06	Pembelian Barang RIBA Daerah Pemangaj Daerah Pemertakabur Daerah	Kab. Kepulauan Anambas	Barang RIBA Daerah yang Teridentifikasi Kerasukan	12 Bulan	75.887.000	Pembelian Barang RIBA Daerah Pemangaj Daerah Pemertakabur Daerah	Kab. Kepulauan Anambas	Barang RIBA Daerah yang Teridentifikasi Kerasukan	12 Bulan	75.887.000	
2.16.01.1.06.01	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sertakan Pemangaj Daerah atau Sertakan Daerah Jaban	Kab. Kepulauan Anambas	Pembelian Sertakan Daerah/Operasional dan Modifikasi	12 Bulan	80.887.000	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sertakan Pemangaj Daerah atau Sertakan Daerah Jaban	Kab. Kepulauan Anambas	Pembelian Sertakan Daerah/Operasional dan Modifikasi	12 Bulan	80.887.000	
2.16.01.1.06.08	Pembelian Perawatan dan Modifikasi	Kab. Kepulauan Anambas	Pembelian Perawatan Keras yang dipertakabur	12 Bulan	25.225.000	Pembelian Perawatan dan Modifikasi	Kab. Kepulauan Anambas	Pembelian Perawatan Keras yang dipertakabur	12 Bulan	25.225.000	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Kepulauan Anambas		12 Bulan	3.488.844.700	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Kepulauan Anambas		12 Bulan	3.488.844.700	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemertakabur Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	Meningkatkan Transparansi Informasi Pemertakabur Daerah	12 Bulan	3.488.844.700	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemertakabur Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	Meningkatkan Transparansi Informasi Pemertakabur Daerah	12 Bulan	3.488.844.700	
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Keras dan Pemertakabur Media Komunikasi Publik	Kab. Kepulauan Anambas	Terakhirnya Informasi Pemertakabur Daerah	12 Bulan	1.007.325.000	Pengelolaan Keras dan Pemertakabur Media Komunikasi Publik	Kab. Kepulauan Anambas	Terakhirnya Informasi Pemertakabur Daerah	12 Bulan	1.007.325.000	
2.16.02.1.01.05	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kepulauan Anambas	Terakhirnya Media Informasi	12 Bulan	408.440.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kepulauan Anambas	Terakhirnya Media Informasi	12 Bulan	408.440.000	
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	Kab. Kepulauan Anambas		12 Bulan	4.073.079.700	Layanan Hubungan Media	Kab. Kepulauan Anambas		12 Bulan	4.073.079.700	



2.16.02	Proyek dan aplikasi informatika	Kab. Kep. Anambas 1		12 Bulan	6.780.780.000	Proyek dan aplikasi informatika	Kab. Kep. Anambas		12 Bulan	6.780.780.000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Ruang Desain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Batas	Kab. Kep. Anambas 1	Adanya Desain dan Sub Daerah Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	4.836.478.000	Pengelolaan Ruang Desain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Batas	Kab. Kep. Anambas	Adanya Desain dan Sub Daerah Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	4.836.478.000	
2.16.02.2.01.02	Pembelaksanaan dan Pengawasan Sistem Desain dan Sub Daerah dalam Peningkatan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Batas	Kab. Kep. Anambas 1	Adanya Sistem Kontrol dan Data Materai Website dan Website Pembelaksanaan Anambas	12 Bulan	276.300.000	Pembelaksanaan dan Pengawasan Sistem Desain dan Sub Daerah dalam Peningkatan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Batas	Kab. Kep. Anambas	Adanya Sistem Kontrol dan Data Materai Website dan Website Website Kontrol dan Kontrol Anambas	12 Bulan	276.300.000	
2.16.02.2.01.03	Peningkatan Sistem Desain dan Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas 1	Adanya Sistem Desain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Anambas	80	4.287.280.000	Peningkatan Sistem Desain dan Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	Adanya Sistem Desain di Lingkup Pemerintah Kabupaten Anambas	80	4.287.280.000	
2.16.02.2.02	Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Batas	Kab. Kep. Anambas 1	Adanya Pengelolaan e- Government Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	2 OPS	2.114.284.000	Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Batas	Kab. Kep. Anambas	Adanya Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	2 OPS	2.114.284.000	
2.16.02.2.02.01	Keterampilan Pengelolaan Sistem yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab. Kep. Anambas 1	Daerah Kabupaten SPSE	1 Bulan dan	236.300.000	Keterampilan Pengelolaan Sistem yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab. Kep. Anambas	Daerah Kabupaten SPSE	1 Bulan dan	236.300.000	
2.16.02.2.02.02	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas 1	Mengembangkan Data Pengantar Daerah agar Dapat di Akses secara Terpadu	2 OPS	181.490.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Mengembangkan Data Pengantar Daerah agar Dapat di Akses secara Terpadu	2 OPS	181.490.000	
2.16.02.2.02.03	Peningkatan Aplikasi dan Pusat Data Pemerintahan Daerah Kabupaten	Kab. Kep. Anambas 1	Adanya Peningkatan Aplikasi dan Pusat Aplikasi Daerah	2 Aplikasi	945.700.000	Peningkatan Aplikasi dan Pusat Data	Kab. Kep. Anambas	Peningkatan Aplikasi dan Pusat Aplikasi Daerah	2 Aplikasi	945.700.000	



			Pemerintah yang Tersebut			Pemerintah Berikut Lainnya		Pemerintah yang Tersebut			
2-16-2020-08	Pengembangan dan Pengujian Keamanan/Kelembutan Cerdas dan Non Cerdas	Kab. Kep. Anambas 1	Jumlah Data/Informasi yang Tersebut Akut Tersebut	1 Data	1.100.000.000	Pengembangan dan Pengujian Keamanan/Kelembutan Cerdas dan Non Cerdas	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Data/Informasi yang Tersebut Akut Tersebut	1 Data	1.100.000.000	
2-20-20	PROGRAM PENGEMBANGAN R STATISTIK STATISTIK	Kab. Kep. Anambas 1			847.892.338	PROGRAM PENGEMBANGAN R STATISTIK STATISTIK	Kab. Kep. Anambas			847.892.338	
2-20-20-2-11	Pengembangan Statistik Sektor di Lingkar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas 1	Adanya Data Statistik Sektor yang Tersebut	1 Data mm	847.892.338	Pengembangan Statistik Sektor di Lingkar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Adanya Data Statistik Sektor yang Tersebut	1 Data mm	847.892.338	
2-20-20-2-11-01	Survei dan Pengumpulan, Pengujian, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Kab. Kep. Anambas 1	Tersebutnya Informasi statistik sektor	1 Data mm	347.800.000	Survei dan Pengumpulan, Pengujian, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Kab. Kep. Anambas	Tersebutnya Informasi statistik sektor	1 Data mm	347.800.000	
2-20-20-2-11-02	Pengujian Kepercayaan RSM Pemerintah Daerah Adapun Rangka Pengujian Data Statistik Daerah yang Tersebut	Kab. Kep. Anambas 1	RSM Statistik Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas yang Profesional dan Berwibawa	1 Data mm	200.000.000	Pengujian Kepercayaan RSM Pemerintah Daerah Adapun Rangka Pengujian Data Statistik Daerah yang Tersebut	Kab. Kep. Anambas	RSM Statistik Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas yang Profesional dan Berwibawa	1 Data mm	200.000.000	
2-20-20-2-11-03	Membangun Statistik Statistik Statistik	Kab. Kep. Anambas 1	Adanya Data Statistik sebagai sumber Perencanaan	1 Data mm	75.000.000	Membangun Statistik Statistik Statistik	Kab. Kep. Anambas	Adanya Data Statistik sebagai sumber Perencanaan	1 Data mm	75.000.000	
2-21-20	PROGRAM PENGEMBANGAN R PERANGKAT STATISTIK PERANGKAT STATISTIK	Kab. Kep. Anambas 1			888.047.338	PROGRAM PENGEMBANGAN R PERANGKAT STATISTIK PERANGKAT STATISTIK	Kab. Kep. Anambas			888.047.338	



2.21.02.1.01	Peningkatan Penjualan Produk Programasi Informatika Daerah Kabupaten/Batas	Kab. Kepulauan	Pengembangan Database Elektronik Dalam Bentuk Analog dan Digital	3 OPD	875.400.000	Peningkatan Penjualan Produk Programasi Informatika Daerah Kabupaten/Batas	Kab. Kepulauan	Pengembangan Database Elektronik Dalam Bentuk Analog dan Digital	3 OPD	875.400.000	
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Kampanye Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Batas Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kepulauan	Tertulisannya Kampanye Informasi Pemerintah Daerah	2 OPD	875.400.000	Pelaksanaan Kampanye Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Batas Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kepulauan	Tertulisannya Kampanye Informasi Pemerintah Daerah	2 OPD	875.400.000	
2.21.02.1.02	Pemasangan Peta Hibrida Koordinasi Ruang Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Batas	Kab. Kepulauan	Pengada Layanan yang akan Terhubung Dalam Jaringan Koordinasi Ruang	2 Dasa	275.887.300	Pemasangan Peta Hibrida Koordinasi Ruang Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Batas	Kab. Kepulauan	Pengada Layanan yang akan Terhubung Dalam Jaringan Koordinasi Ruang	2 Dasa	275.887.300	
2.21.02.1.02.02	Operasionalisasi Jaringan Koordinasi Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Batas	Kab. Kepulauan	Terselenggaranya Koordinasi yang akan dilakukan	2 Dasa	275.887.300	Operasionalisasi Jaringan Koordinasi Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Batas	Kab. Kepulauan	Terselenggaranya Koordinasi yang akan dilakukan	2 Dasa	275.887.300	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui kegiatan Musrenbang mulai dari Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, Perangkat Daerah akan menyerap aspirasi dari masyarakat.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan TUPOKSI Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

Berdasarkan Hasil Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tidak menerima adanya usulan yang di sampaikan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Kepulauan Anambas

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pencapaian sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) tahun 2021 yang mengambil tema "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin.

Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong."

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan urusan sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisa yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengurusan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo menetapkan Arah Pembangunan Nasional ke dalam 3 (tiga) tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Tereujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;



5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026 ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pemerataan jaringan telekomunikasi, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.1.2 Badan Pusat Statistik

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 - 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 - 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 mencakup :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);

4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; dan
6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar perjaminan kualitas.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 3 bidang utama prioritas Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan;
2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pusat Statistik (BPS); dan
3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di Badan Pusat Statistik (BPS).

Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data agar dapat tersedia lebih cepat, dan dapat diperoleh lebih mudah, lebih berkualitas dan lebih murah. Oleh karena itu dibutuhkan strategi komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam, saat ini belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

Keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan BPS merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik.

Peningkatan kebutuhan daya yang diperlukan Kementerian dan Lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktifitas survei sektoral dan ad hoc yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc dimana seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat, upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas daya yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

3.1.3 Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional

Melalui pelaksanaan arah Organisasi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), diharapkan akan membangkitkan dan mendorong seluruh entitas untuk bersinergi dalam mewujudkan tujuan sebagai institusi pemerintah yang memiliki daya kreativitas penuh inovatif, berpegang teguh pada prinsip

efektivitas, efisiensi, dan akuntabel serta dilindungi dengan nilai moral dan budaya kerja yang tinggi.

Misi BSSN Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka memperjelas aspek aspek penting yang perlu difokuskan dalam pencapaian visi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Misi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia;
2. Menyelenggarakan keamanan siber dan perundangan secara efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

Tujuan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN);

Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia;
2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima;
3. Terwujudnya birokrasi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) yang bersih, akuntabel, berkeaja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 sebagai perumusan fokus program, kegiatan dan sub kegiatan strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar pengusunan Rencana Kerja setiap tahunnya mengacu kepada Tujuan dan Sasaran yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026.

Adapun tujuannya dimaksud sebagai berikut :

1. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Pemunjang Layanan Telekomunikasi; dan
2. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Diskominfo Kab. Kep. Anambas.

Sedangkan sasaran Rencana Kerja (Renja) juga mengacu kepada sasaran yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. Meningkatkan Kapasitas Bandwidth/Pita Lebar;
3. Mewujudkan Infrastruktur Jaringan Internet/Intranet Pemerintah Daerah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
4. Meningkatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Termamfaatkan Data dan Informasi Statistik Sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
6. Terwujudnya Aplikasi yang Aman di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Mewujudkan Percepatan Pelayanan Publik;
8. Manajemen Tata Kelola Pemerintah di Diskominfo yang Baik dan Bersih.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Tahun Anggaran 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun
				2022
1	2	3	4	5
1	Mempercepat Pengembangan Infrastruktur Perunggang Layanan Telekomunikasi	Meningkatkan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi di Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Persentase Ketersediaan Dan Desa Yang Terjangkau Akses Jaringan Telekomunikasi	94,44%
			Persentase Ketersediaan Desa Desa Yang Terjangkau Akses Jaringan Radio Komunikasi	2 Desa
		Meningkatkan Kapasitas Bandwidth /Pita Lebar	Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Internet Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan	2 Tbit/ 10 Mbps
		Mengajukan Infrastruktur Jaringan Internet/Internet Pemerintah Daerah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Tersedianya Pengembangan Jaringan Fiber Optik (FO)	8 KM
			Tersedianya Pengembangan Tower 5G/Tranged Telekomunikasi	2 Titik
2	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas	Meningkatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	Pelaksanaan Sistem Informasi Aplikasi Perhubungan Elektronik disertai Perangkat Daerah	2 Aplikasi
		Tersedianya Data dan Informasi Statistik Sekunder Kabupaten Kepulauan Anambas	Laju Pembaruan Data Statistik	600 Surjungan
		Tersedianya Aplikasi yang Arah di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas	Persentase Pelaksanaan Keimanan Digital Perangkat Daerah	2 OPD
		Meningkatkan Percepatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Informasi yang dapat di Akses	2 OPD
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Diskominfo Kab. Kep. Anambas	Manajemen Tata Kelola Pemerintah di Diskominfo yang Baik dan Bersih	Produk Rikis SANIP Perangkat Daerah	1

Sumber: Ditanyu Kelangka (Ditanyu) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2021 - 2022

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses perjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang disusun. Dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2022 melaksanakan 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan sebagaimana berikut ini :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

B. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
 - b. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
 - c. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media.

C. Program Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
2. Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
 - c. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral.

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (*benchmark*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Sebagai rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023, maka dapat di lihat pada Tabel di bawah ini;

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Anambas

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2022				Catatan & Penjelasan	Perkiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Paga Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Paga Indikatif
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
2.16.01	PROGRAM PERUBAHAN URURAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	7.174.012.697	APBD HKDA	-	12 Bulan	7.174.012.697
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi yang disusun	Kab. Kep. Anambas	3 Dokumen	12.760.000	APBD HKDA	-	3 Dokumen	12.760.000
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	2 Dokumen	3.644.000	APBD HKDA	-	2 Dokumen	3.644.000
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS	Dokumen RKAS	Kab. Kep. Anambas	-	-	APBD HKDA	-	-	-



2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	-	-	APBD RKA	-	-	-
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	-	-	APBD SKA	-	-	-
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	-	-	APBD SKA	-	-	-
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Realisasi Fiskal dan Keuangan	Kab. Kep. Anambas	-	-	APBD SKA	-	-	-
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	9.116.500	APBD SKA	-	1 Dokumen	9.116.500
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan yang di selidiki	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	4.825.310.462	APBD RKA	-	12 Bulan	4.825.310.462
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	4.524.415.462	APBD SKA	-	12 Bulan	4.524.415.462
2.16.01.2.02.02	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	298.200.000	APBD SKA	-	12 Bulan	298.200.000
2.16.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	2.695.000	APBD SKA	-	12 Bulan	2.695.000
2.16.01.2.03	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Rebutuhan Pemangkas Aparatur	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	322.419.600	APBD RKA	-	12 Bulan	322.419.600



2.16.01.2.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Berorta Akibat Kelangkaan	Jenis Pakaian Dinas	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	95.409.000	APBD KKA	-	12 Bulan	95.409.000
2.16.01.2.05.0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SDM Aparatur Dinas yang Profesional/ Berprestasi (Pbka)	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	227.010.000	APBD KKA	-	12 Bulan	227.010.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	918.911.880	APBD KKA	-	12 Bulan	918.911.880
2.16.01.2.06.0 1	Penyediaan Komputer, Instalasi Listrik/ Pemasangan Bangunan Kantor	Jenis Komputer Instalasi Listrik/ Pemasangan Kantor yang disediakan	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	16.305.200	APBD KKA	-	12 Bulan	16.305.200
2.16.01.2.06.0 2	Penyediaan Perakitan dan Perleengkapan Kantor	Jenis Perakitan Kantor yang tersedia	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	183.910.000	APBD KKA	-	12 Bulan	183.910.000
2.16.01.2.06.0 3	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Jenis Perakitan Rumah Tangga yang tersedia	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	21.571.000	APBD KKA	-	12 Bulan	21.571.000
2.16.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	91.878.000	APBD KKA	-	12 Bulan	91.878.000
2.16.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	104.025.350	APBD KKA	-	12 Bulan	104.025.350
2.16.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	498.322.000	APBD KKA	-	12 Bulan	498.322.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Barang Milik Daerah yang disediakan	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	222.835.000	APBD KKA	-	12 Bulan	222.835.000



	Pemangjag Urusan Pemertatah Daerah								
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Pemertaga Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas/Operasional yang diadukan	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	119.480.000	APBD KKA	-	12 Bulan	119.480.000
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kantor Lainnya yang Terselesa	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	50.180.000	APBD KKA	-	12 Bulan	50.180.000
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan Gedung Kantor	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	52.875.000	APBD KKA	-	12 Bulan	52.875.000
2.16.01.2.08	Pengadaan Jasa Pemertajag Urusan Pemertatah Daerah	Jasa Pelayanan Kantor	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	801.188.085	APBD KKA	-	12 Bulan	801.188.085
2.16.01.2.08.01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat Dinas	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	108.733.850	APBD KKA	-	12 Bulan	108.733.850
2.16.01.2.08.02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	270.500	APBD KKA	-	12 Bulan	25.270.500
2.16.01.2.08.04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	687.181.735	APBD KKA	-	12 Bulan	687.181.735
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemertajag Urusan Pemertatah Daerah	Barang Milik Daerah yang Teridentifikasi Berwujud	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	73.887.500	APBD KKA	-	12 Bulan	73.887.500
2.16.01.2.09.01	Pengadaan Jasa Pemertajagan, Biaya Pemertajagan dan Pajak Kendaraan	Pemertajagan Kendaraan Dinas/Operasional dan Memiliki Tol	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	40.667.500	APBD KKA	-	12 Bulan	40.667.500



	Pembiayaan Dinas atau Kendaraan Dinas / Jabatan								
2.16.01.2.01.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kerja yang diperbaiki	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	33.220.000	APBD SKA	-	12 Bulan	33.220.000
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	5.488.844.700	APBD SKA	-	12 Bulan	5.132.843.700
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Transparansi Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	5.488.844.700	APBD SKA	-	12 Bulan	5.132.843.700
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terselenggaranya Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	1.057.535.000	APBD SKA	-	12 Bulan	700.000.000
2.16.02.2.01.05	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Data Informasi	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	408.481.000	APBD SKA	-	12 Bulan	410.013.000
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media		Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	4.022.828.700	APBD SKA	-	12 Bulan	4.022.828.700
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	6.750.762.900	APBD SKA	-	12 Bulan	6.918.538.277
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Tingkat	Adanya Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	4.636.478.000	APBD SKA	-	12 Bulan	7.170.444.201



	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.03.2.01.0 2	Penualakan dan Pengurusan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Akses Komunitas Data Melalui Website dan Wehmail Pemda Kepulauan Anambas	Kab. Kep. Anambas	12 Bulan	279.195.000	APBD KKA	-	12 Bulan	302.500.000
2.16.03.2.01.0 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Adanya Akses Internet di Lingkungan Pemda Kepulauan Anambas	Kab. Kep. Anambas	80.00	4.357.283.000	APBD KKA	-	80.00	4.657.944.201
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Litagup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	Kab. Kep. Anambas	2 OPD	2.114.284.800	APBD KKA	-	2 OPD	2.746.094.476
2.16.03.2.02.0 2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen Analisis SPDB	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	256.346.000	APBD KKA	-	-	459.500.000
2.16.03.2.02.0 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Mengintegrasikan Data Perangkat Daerah agar Dapat di Akses Secara Terpadu	Kab. Kep. Anambas	2 OPD	181.490.000	APBD KKA	-	2 OPD	1.076.890.476
2.16.03.2.02.0 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses	Adanya Pengembangan Aplikasi Umum	Kab. Kep. Anambas	2 Aplikasi	345.765.000	APBD KKA	-	2 Aplikasi	229.200.000



	Basis Pemerintahan Berbasis Elektronik	dan Aplikasi Khusus Pemerintahan yang Terintegrasi							
2.16.03.2.02.04	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terjangkau Akses Telekomunikasi	Kab. Kep. Anambas	1 Desa	1.130.723.300	APBD KKA	-	1 Desa	999.100.000
2.20.03	PROGRAM PENYELENGARAAN STATISTIK Sektoral		Kab. Kep. Anambas		647.992.336	APBD KKA	-		1.000.000.000
2.20.03.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	Kab. Kep. Anambas	3 Dokumen	647.992.336	APBD KKA	-	2 Dokumen	1.000.000.000
2.20.03.2.01.01	Koordinasi dan Sosialisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terwujudnya kegiatan statistik sektoral	Kab. Kep. Anambas	2 Dokumen	347.500.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	490.000.000
2.20.03.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	SDM Statistik Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas yang Profesional dan Tersertifikasi	Kab. Kep. Anambas	7 Orang	200.000.000	APBD KKA	-	6 Orang	200.000.000
2.20.03.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Adanya Dokumen Metadata sebagai acuan Pemerintahan	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	70.492.336	APBD KKA	-	1 Dokumen	490.000.000



2.21.02	PROGRAM PENYELENGARAAN PERBANDARAN INTYER PERDAMARAN INFORMASI		Kab. Kep. Anambas	3 OPD	958.347.300	APBD KKA	-	3 OPD	300.000.000
2.21.02.2.01	Pengembangan Pemasangan Untuk Pemasangan Informasi Pemasangan Daerah Kabupaten/Kota	Penggunaan Dokumen Elektronik Dalam Bentuk Analog dan Digital	Kab. Kep. Anambas	3 OPD	679.460.000	APBD KKA	-	3 OPD	100.000.000
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Komunikasi Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	3 OPD	679.460.000	APBD SKA	-	3 OPD	100.000.000
2.21.02.2.02	Pemasangan Pola Hubungan Komunikasi Sudi Antar Pongkat Daerah Kabupaten/Kota	Penggunaan Layanan yang akan Terhubung Dalam Jaringan Komunikasi Sudi	Kab. Kep. Anambas	2 Desa	278.887.300	APBD KKA	-	3 Desa	200.000.000
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sudi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Telekomunikasi yang di amankan	Kab. Kep. Anambas	2 Desa	278.887.300	APBD SKA	-	3 Desa	200.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PERDANAAN

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022, dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2022

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2022		
			Kebijakan Desa/Pagu Indikator	Sumber Dana	Target Capaian
1	2	3	4	5	6
2.16.01	PROGRAM PERHIMPAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/MTA		7.174.812.697	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi yang disusun	12.760.000	APBD KKA	3 Dokumen
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.644.000	APBD KKA	2 Dokumen
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	-	APBD KKA	-
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	-	APBD KKA	-
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	-	APBD KKA	-
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA SKPD	-	APBD KKA	-
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Realisasi Fiskal dan Keuangan	-	APBD KKA	-
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	9.116.500	APBD KKA	1 Dokumen



2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan yang di sediakan	4.825.310.462	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS	4.524.415.462	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelayanan Administrasi Keuangan	298.200.000	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2.695.000	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kebijakan Peningkat Aparatur	222.419.600	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.03.02	Pengadaan Pakar Dinas Beserta Akibat Kelangkaannya	Jenis Pakar Dinas	90.409.600	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.03.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SDM Aparatur Dinas yang Profesional/Baru/ditlatih	227.010.000	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	918.911.350	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.04.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan	36.205.200	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.04.02	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jenis Peralatan Kantor yang tersedia	183.910.000	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.04.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	21.571.000	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.04.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	61.878.000	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.04.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	104.025.350	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.04.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah	498.323.000	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkat Efisiensi Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang diadakan	222.838.000	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Pemrograman Dinas atau	Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	119.480.000	APBD KKA	12 Bulan



	Kendaraan Dinas Jabatan				
2.16.01.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kantor Lainnya yang Tersedia	50.180.000	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan Gedung Kantor	51.875.000	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penjangkutan Pemerintahan Daerah	Jasa Pelayanan Kantor	801.188.098	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Survei Menyurat	Penyediaan Jasa Survei Menyurat Dinas	108.731.850	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sender Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi Sender Daya Air dan Listrik	25.370.500	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan Gaji Pegawai Tetap (PTT)	667.183.735	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penjangkutan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Teridentifikasi Kerusakan	71.897.500	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.09.01	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Mobilisasi lain	40.667.500	APBD KKA	12 Bulan
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kerja (Juga Operasional)	31.230.000	APBD KKA	12 Bulan
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		5.488.844.700	APBD KKA	12 Bulan
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Transparansi Informasi Pemerintah Daerah	5.488.844.700	APBD KKA	12 Bulan
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Koneksi dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi Pemerintah Daerah	1.057.535.000	APBD KKA	12 Bulan
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Data Informasi	408.481.000	APBD KKA	12 Bulan
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media		4.022.828.700	APBD KKA	12 Bulan
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		6.750.763.300	APBD KKA	



2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	4.436.478.000	APBD DKA	12 Bulan
2.16.03.2.01.02	Penyediaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Akses Komunikasi Data Melalui Website dan Webmail Pemkab Kepulauan Anambas	279.195.000	APBD DKA	12 Bulan
2.16.03.2.01.03	Pengembangan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Adanya Akses Internet di Lingkungan Pemkab Kepulauan Anambas	4.357.283.000	APBD DKA	80.00
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	2.114.284.800	APBD DKA	2 OPD
2.16.03.2.02.02	Strukturalisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen Arsitektur SPBE	256.306.000	APBD DKA	1 Dokumen
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Mengintegrasikan Data Perangkat Daerah agar Dapat di Akses Secara Terpadu	181.490.000	APBD DKA	2 OPD
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Adapun Pengembangan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus Persebaran yang Terintegrasi	543.765.000	APBD DKA	2 Aplikasi
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terjangkau Akses Telekomunikasi	1.130.733.300	APBD DKA	1 Desa
3.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		647.992.336	APBD DKA	
3.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	647.992.336	APBD DKA	2 Dokumen
2.20.02.2.01.01	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	Terseleksiannya kegiatan statistik sektoral	347.500.000	APBD DKA	2 Dokumen



	Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sekunder				
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	SDM Statistik Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas yang Profesional dan Bersertifikasi	230.000.000	APBD KKA	7 Orang
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sekunder	Adanya Dokumen Metadata sebagai acuan Pemerintahan	30.402.336	APBD KKA	1 Dokumen
2.21.02	PROGRAM FERTELEKOMUNIKASI PERSEDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		668.387.300	APBD KKA	3 OPD
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persediaan Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengamanan Dokumen Elektronik Dalam Bentuk Analog dan Digital	679.400.000	APBD KKA	3 OPD
2.21.02.2.01.01	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bentuk Elektronik dan Non-Elektronik	Tertindakannya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	679.400.000	APBD KKA	3 OPD
2.21.02.2.02	Penciptaan Pola Hubungan Komunikasi Sendi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penggunaan Layanan yang akan Terhubung Dalam Jaringan Komunikasi Sendi	278.887.300	APBD KKA	3 Desa
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sendi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Telekomunikasi yang di amankan	278.887.300	APBD KKA	3 Desa

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 merupakan bentuk penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026. Rencana kerja ini disusun untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis beserta target yang ingin dicapai (akhir periode rencana 2021 – 2026).

Dinas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis, seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Tahunan ini maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas harus segera melakukan peningkatan kualitas pelayanan dalam Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Karena Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan senantiasa menyediakan Informasi yang dibutuhkan masyarakat baik yang berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai Dinas yang menjalin Komunikasi timbak balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tidak saja harus mampu menjadi sumber informasi, tetapi juga harus mampu membuat produk - produk teknologi informasi terbaru dan terbarukan dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi garda utama

dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Untuk dapat meningkatkan kinerja diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan ketersediaan anggaran serta adanya komitmen pemangku kepentingan dan personel Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas serta didukung segenap stakeholders yang ada.

Belanjutnya kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Sehingga Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan bisa dilaksanakan dengan baik serta diharapkan dapat memacu kinerja aparatur sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tanjung, 19 Juli 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAH,**

JAFRIAL, S.Kom., M.A

Pejabat NKT. IV/b

NIP. 19750130 2003 12 1 008